

Globalisasi dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pengetahuan

Praja Firdaus Nuryananda

Mahasiswa Pascasarjana Hubungan Internasional
FISIP Universitas Airlangga Surabaya

e-mail: firdaus.praja@gmail.com

ABSTRACT

Defining globalization as internationalization and de-territorialization is shifting the role of information as the product of knowledge to be the knowledge itself. This shifting is dragging information to be a potential property of feudal who control of the access and the process. This has been marked as informational feudalism. This paper actualizes the concept of informational feudalism by giving empirical studies of Eli Lily-Madagascar and Nicotine-Pharmacy Industry in United States of America. The medicine to cure cancer had been made from rosy periwinkle came from Madagascar. Instead of being a common property, the medicine was a private property because Eli Lily had sold it to people with high price. In the USA, research studies and scientific papers were used in the campaign of using the alternative nicotine therapy, considering the harm of smoking activities. From two examples given, the remark is that information and knowledge has been becoming a new modus for feudal to take profit without educate the people.

Keywords: globalization, informational feudalism, knowledge, information.

Globalisasi yang didefinisikan sebagai internasionalisasi dan deteritorialisasi, menggeser informasi yang dulunya adalah hasil dari ilmu pengetahuan melalui tahapan eksperimen menjadi informasi adalah pengetahuan itu sendiri. Akibat dari adanya pergeseran tersebut, pengetahuan hanya dipegang oleh segelintir golongan yang mempunyai kemampuan akses dan pengolahan informasi. Inilah yang disebut dengan feodalisme informasi. Tulisan ini mengaktualisasikan konsep feodalisme informasi melalui contoh kasus Eli Lily-Madagaskar dan Nikotin-Industri Farmasi di Amerika Serikat. Temuan obat kanker dengan bahan baku rosy periwinkle yang ada di Madagaskar berubah sifat dari common property menjadi private property ketika perusahaan yang dipimpin oleh Eli Lily menjual obat tersebut pada Madagaskar dengan harga yang tinggi. Begitu pula dengan proses menjadikan hasil riset dan karya tulis ilmiah sebagai kampanye penggunaan terapi alternatif nikotin di Amerika Serikat. Dari dua contoh kasus tersebut, informasi dan pengetahuan memang menjadi modus baru bagi feodal untuk menggelontorkan pemasukan tanpa melakukan kegiatan pencerdasan.

Kata-Kata Kunci: globalisasi, feodalisme informasi, pengetahuan, informasi.

Komodifikasi Pengetahuan dan Problem Aksesibilitas

Columbian epoch atau Columbian exchange adalah sebutan untuk masa dimana ditemukannya benua Amerika oleh penjelajah Eropa di pertengahan abad 15. Bagi banyak orang di dunia, columbian exchange adalah masa dimana kejayaan

pengetahuan sampai pada puncaknya lewat eksplorasi. Akan tetapi tidak sedikit yang mengatakan bahwa eksplorasi pada saat itu adalah jalan keluar bagi kapitalisme Eropa untuk mengatasi keterbatasan akses pasar domestik di Eropa. Vandana Shiva (1993) adalah salah seorang akademisi yang mengatakan bahwa *columbian exchange* merupakan doktrin penemuan (*discovery*), yang mengubah wacana orientasi kapital kepada wacana penemuan atau inovasi.

Di abad 21 ini, Shiva (1993) menemukan relevansi *columbian exchange* ini dalam kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi juga bisa terwujud dalam bentuk internasionalisasi, salah satunya melalui organisasi internasional (Scholte 2000). *Columbian exchange*, yang membawa wacana *discovery* untuk memperoleh kapital, dalam globalisasi berbentuk konvensi lingkungan hidup. Konvensi lingkungan hidup ini bernama Convention on Biological Diversity (CBD). CBD diawali pada tahun 1992. CBD sendiri sebenarnya diadakan dengan tujuan melindungi biodiversitas alam, terutama biodiversitas lingkungan tropis yang banyak terdapat di negara-negara berkembang. Konservasi biodiversitas ini mengandalkan pengembangan genetis bioteknologi yang diproses oleh *multinational corporations* (MNC) dengan bahan baku dari negara-negara berkembang. Globalisasi yang menghubungkan negara maju, negara berkembang, dan MNC ini kemudian menimbulkan relasi tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju mendapatkan bahan baku proses pengembangan konservasi lingkungan dari negara berkembang dengan murah dan bahkan bebas. Namun untuk mengakses hasil olahan negara maju tersebut negara berkembang harus membayarnya dengan harga yang mahal (Verma 2000).

Salah satu contoh dari hubungan asimetris negara maju yang diwakili MNC dengan negara berkembang sebagai produsen bahan baku adalah kasus Eli Lilly dan negara Madagaskar. Penyakit kanker jenis Hodgkins dan Pediatric Lymphocyte Leukemia adalah penyakit kanker yang bisa disembuhkan. Penyembuhan ini tidak lepas dari inovasi farmasi yang berhasil mengubah tanaman *rosy periwinkle* menjadi obat mujarab dari penyakit Hodgkins dan Pediatric Lymphocyte Leukemia. Eli Lilly adalah pihak yang berjasa menemukan inovasi tersebut. Eli Lilly sendiri telah meraup US\$ 100 juta tiap tahunnya berkat obat dari *rosy periwinkle*. Ironisnya, Madagaskar sebagai produsen utama *rosy periwinkle* tidak mendapatkan sepeser pun dari inovasi obat *rosy periwinkle* tersebut (Verma 2000). Inilah yang kemudian membuat Shiva (1993) yakin bahwa globalisasi membuat sebuah pola inter-relasi yang berat sebelah. Contoh ini jelas membuktikan bahwa pengetahuan dan inovasi telah dikomodifikasikan.

Berkaca dari kasus Eli Lilly dan Madagaskar, globalisasi ternyata juga tidak memberikan aksesibilitas yang simetris kepada seluruh masyarakat dunia, terutama dalam aspek biodiversitas. Ini bisa diargumentasikan ketika globalisasi diturunkan menjadi IPR (Intellectual Property Rights), seperti yang dilakukan oleh Shiva (1993). Aksesibilitas antar negara justru terkesan asimetris, yang mana negara dunia ketiga lebih sering dirugikan daripada diuntungkan. Dalam perundingan perdagangan dan hak kepemilikan intelektual di GATT (General Agreement on Tariff and Trade) misalnya, wacana yang berkembang terkait biodiversitas adalah inovasi dan teknologi hanya akan mencapai efektivitas ketika didukung oleh modal (*capital*) dan para peneliti modern. Sedangkan intelektualitas yang diukur melalui teknologi dan pengetahuan juga dikerucutkan hanya pada teknologi dan pengetahuan yang mendatangkan keuntungan. Parahnya, justru intelektualitas semacam itulah yang diakui di perundingan internasional.

Bagi masyarakat kapital, globalisasi dan IPR menjadikan biodiversitas yang sebelumnya sebagai *common property* menjadi *private property*. Dengan perubahan

ini maka orientasi dari produk biodiversitas juga berubah dari *social goods* menjadi *capital returns* (Shiva 1993). Perubahan ini tentu saja sangat menguntungkan negara dunia pertama dan kedua yang sangat kuat dalam modal (*capital*). Kasus Eli Lily dengan Madagaskar menjadi penekan dalam hal ini. Narasi *rosy periwinkle* (*social goods*) menjadi obat kanker yang dikembangkan oleh Eli Lily (*capital returns*) adalah contoh bagaimana *common property* menjadi *private property*.

Apa yang dinyatakan oleh Vandana Shiva (1993) sebenarnya sejalan dengan kepercayaan Drahos dan Braithwaite (2002) tentang feodalisme informasi. Feodalisme informasi adalah bentuk baru dari transformasi hubungan produksi yang eksploitatif dan *inegalitarian*. Hubungan yang dimaksud merujuk pada pengulangan historis tentang bentuk feodalisme dalam produksi, dalam hal ini produksi informasi (Drahos dan Braithwaite 2002). Jika dalam dunia industri ekonomi, kekayaan (*wealth*) muncul dari kontrol terhadap buruh dan modal, maka penyebaran informasi pada era globalisasi tak lain merupakan akumulasi dari kontrol terhadap hak paten.

Akumulasi ini kemudian menimbulkan pola-pola baru feodalisme yang hasil akhirnya adalah ketimpangan. Pemilik hak paten yang disebut sebagai 'kaum feodal' dalam era infofeodal tidak perlu melakukan produksi secara kontinyu untuk mendapatkan 'akumulasi kapital'. Ia hanya perlu mendapatkan 'pekerja' yang memanfaatkan pengetahuan dan informasi yang dihasilkannya, dan pekerja inilah yang akan memberikan royalti yang terus terakumulasi menjadi kapital baru.

Jadi, jika ada anggapan bahwa globalisasi memperluas akses terhadap teknologi informasi, anggapan ini tidak terlalu tepat. Pada kenyataannya, penyebaran teknologi informasi dalam globalisasi berbenturan dengan apa yang disebut sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual atau *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) atau yang lebih dikenal sebagai hak paten. Ketika seorang individu menemukan dan mengembangkan pengetahuan baru, ia dapat mendaftarkan paten pada pengetahuan yang dihasilkannya sehingga orang lain tidak dapat mengembangkan dan atau memanfaatkan pengetahuan yang sama. Pada dasarnya, baik Shiva maupun Drahos dan Braithwaite secara substansial ingin mengatakan bahwa komodifikasi pengetahuan telah terjadi dan ini sangat menimbulkan interaksi yang *zero-sum* antar pihak yang berkepentingan. Globalisasi, bukannya mengeliminasi hal ini tapi justru memperparah keadaan.

Feodalisme Informasi dan Perang Nikotin

Food and Drug Administration (FDA) adalah bagian dari pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang mengatur tentang regulasi perizinan makanan dan obat-obatan. Tidak hanya mengatur regulasi perizinan makanan dan obat-obatan, FDA adalah biro kesehatan yang berhak menentukan kriteria produk farmasi mana yang layak edar di masyarakat dan yang dilarang untuk diedarkan di masyarakat. Sayangnya, tidak ada biro pemerintah lain di bawah atap U.S. Public Health Service yang memiliki jejak rekam dokumentasi pelanggaran administratif dan catatan korupsi sebanyak FDA.

Ketika di AS sedang semarak kampanye anti rokok pada pertengahan 1960 dan 1970, FDA adalah badan pemerintah yang paling sibuk untuk mengurus isu tersebut. Berbagai cara telah dilakukan oleh FDA untuk memperkecil angka konsumen rokok. Salah satunya adalah bekerja sama dengan perusahaan multinasional obat-obatan bernama Pharmacia.

Pharmacia, bekerja sama dengan FDA, telah berhasil mengembangkan terapi alternatif nikotin di tahun 1961. Jadi, FDA dan Pharmacia menekankan pada penggunaan nikotin. Namun, hasil dari temuan FDA dan Pharmacia ini kemudian tidak langsung diperjualbelikan oleh FDA karena beberapa alasan. Pada tahun 1972 Pharmacia berhasil menelurkan produk permen karet nikotin. Di belahan dunia yang lain, tepatnya di tahun 1978, perusahaan SmithKline Beecham meluncurkan produk bernama Nicorette yang sebenarnya sama dengan produk Pharmacia yang berbentuk permen karet nikotin. SmithKline Beecham sendiri adalah perusahaan multinasional Inggris yang bergerak di bidang obat-obatan. Baru pada tahun 1984 FDA secara resmi menyetujui permen karet *nicotine polacrilex* (Nicorette) sebagai obat untuk merokok dan diedarkan di pasaran luas masyarakat.

Pada tahun 1980-an akhir, seorang ilmuwan Universitas Duke, Jed Rose menemukan koyo nikotin sebagai alternatif rokok. Pharmacia kemudian berinisiatif untuk memproduksi secara massal koyo nikotin. Akhirnya dengan menggandeng anak perusahaan Johnson & Johnson, Pharmacia mengedarkan koyo nikotin buaatannya dengan nama Nicotrol. Sedangkan perusahaan SmithKline Beecham memasarkan produk koyo nikotin tersebut dengan nama Nicoderm. FDA menyetujui Nicotrol dan Nicoderm sebagai obat anti merokok atau sebagai terapi alternatif pengganti rokok disetujui oleh FDA pada tahun 1991. Pada tahun 1996, FDA menghapus regulasi persyaratan resep untuk mendapatkan Nicotrol dan Nicoderm (Hamilton 2001).

Penjelasan diatas adalah sekelumit gambaran bagaimana sebuah negara dengan kekuatan modal yang besar seperti AS telah mengembangkan teknologinya untuk memerangi rokok, atau setidaknya meminimalisir pengguna rokok kretek di negaranya. Pengembangan permen karet nikotin dan koyo nikotin dalam konteks diatas sebenarnya adalah contoh konkret bagaimana komodifikasi pengetahuan telah berkembang. Teknologi AS dan Inggris dalam mengembangkan terapi alternatif nikotin sebenarnya adalah perihal kesehatan. Kesehatan publik seharusnya adalah tanggung jawab negara. Namun, bisa kita lihat bahwa bukan negara yang kemudian berperan besar dalam pengembangan teknologi tersebut, justru perusahaan multinasional lah yang berhasil menemukan teknologi canggih pengganti rokok kretek.

Alih-alih menggunakan teknologi untuk kesehatan masyarakat, teknologi terapi alternatif rokok kretek dikembangkan untuk membuka pasar baru. Pasar yang selama ini sangat sulit untuk diraih negara-negara maju, yakni pasar konsumen rokok. Keterbatasan bahan baku oleh negara-negara maju memaksa mereka untuk mengembangkan produk yang mengandung nikotin tanpa perlu memproduksi rokok. Akibatnya, negara maju dapat mengeksport rokok produksi dalam negeri mereka keluar negeri dengan harga terjangkau tanpa menghilangkan permintaan pasar dalam negeri mereka akan nikotin. Nikotin dalam negeri AS, misalnya, telah terpenuhi oleh produk-produk permen karet nikotin dan koyo nikotin yang dikembangkan oleh pihak swasta.

Menariknya, sebelum negara AS melegalkan perdagangan nikotin mereka secara internasional, negara AS telah terlebih dahulu mengeluarkan larangan terhadap produk serupa. Pada tahun 1993 pemerintah AS telah mengeluarkan larangan penjualan produk terapi alternatif rokok (permen karet dan koyo) secara internasional karena terbukti belum produk tersebut belum efektif. Setelah pemerintah mengeluarkan dana kucuran sebesar \$452.000 kepada pihak swasta terkait pengembangan produk terapi alternatif rokok pada tahun 1996, akhirnya produk terapi alternatif rokok diperbolehkan pemerintah AS untuk diperjualbelikan secara internasional (Hamilton 2001).

Selain membahas bagaimana sikap negara, biro negara, dan perusahaan multinasional menyikapi isu tembakau dan rokok, perang nikotin juga membahas tentang perang asosiasi medis di AS dan Inggris terkait kampanye mereka di sejumlah publikasi ilmiah perihal kejahatan yang terkandung dalam nikotin. Asosiasi medis tersebut diantaranya adalah American Medical Association (AMA) dan British Medical Association (BMA). Selain itu terdapat juga peran British Medical Journal (BMJ) dan Robert Wood Johnson Foundation (RWJF).

Agar komoditas permen karet dan koyo pengganti rokok dapat menggantikan rokok di pasaran konsumen, pihak farmasi AS dan Inggris bekerjasama dengan pihak medis setempat. Baik AMA maupun BMA setiap tahunnya mendapatkan kucuran dana finansial dari perusahaan-perusahaan farmasi dan pemerintah dengan garansi mereka selalu mendukung gerakan bebas merokok. Para tahun 1998, AMA dan BMA dengan kompak dan lantang mendesak pemerintah mereka masing-masing untuk memaksa perusahaan-perusahaan rokok mengurangi kadar nikotin dalam rokok yang mereka produksi (Hamilton 2001).

Sementara itu BMJ dan Journal of the American Medical Association (JAMA) juga mendapat banyak dana untuk anggaran mereka dari iklan farmasi yang dimuat di jurnal masing-masing. Baik BMJ dan JAMA sama-sama mengeluarkan edisi tentang pengendalian tembakau dalam rangka mendukung gerakan penggantian rokok. Tidak hanya itu, kedua jurnal tersebut juga mempublikasikan beberapa editorial mereka yang membahas mengenai pengendalian tembakau serta mempromosikan produk-produk farmasi untuk mengganti rokok. Tidak hanya jurnal medis, program medis dengan tajuk SmokeLess States yang dimotori oleh RWJF pun juga melakukan hal yang sama dengan BMJ dan JAMA, yakni mendukung pengendalian tembakau dan mempromosikan produk-produk farmasi yang dapat menggantikan rokok (Hamilton 2001).

Feodalisme informasi adalah ketika segelintir informasi hanya dipegang oleh beberapa pihak saja dan dari informasi tersebut pihak-pihak yang memegang informasi tersebut banyak diuntungkan secara materi. Gerakan yang dijalankan oleh BMJ, JAMA, dan RWJF merupakan feodalisme informasi dimana ketiganya sangat diuntungkan dengan informasi dan pengetahuan tentang terapi alternatif pengganti rokok. Dengan semakin banyak dan besarnya peredaran produk-produk farmasi untuk terapi alternatif pengganti rokok, maka akan semakin deras dana yang mengalir ke pihak farmasi dan medis. Ini bukanlah pemanfaatan pengetahuan dan inovasi atas nama *capital goods* dan *common property*, namun inilah cerminan dari *capital returns* dan *private property* jika tidak *communitarian property*.

Menarik untuk disimak adalah pergeseran nilai dalam merokok yang terjadi di masyarakat negara AS yang kemudian merebak menjadi perspektif masyarakat global perihal merokok. Lebih dari seperempat abad yang lalu, merokok sebenarnya sudah dianggap sebagai hal yang merugikan dan kurang rasional. Namun, kerugian itu masih dalam skala individual. Jadi, siapa yang merokok, dialah yang merugi. Akan tetapi pada periode 1980-an kerugian akan merokok bergeser menjadi kerugian atas diri sendiri dan kerugian untuk orang lain. Oleh karenanya aktivitas merokok adalah aktivitas yang perlu penanganan. Tentu saja penanganan yang berkembang kemudian adalah penanganan farmakologis (Hamilton 2001).

Pada tahun 1988, sebuah laporan dari Surgeon General menyatakan bahwa merokok adalah penyakit yang harus disembuhkan. Sedangkan tembakau adalah racun yang harus dihindari oleh konsumen. Pada saat itu, FDA sudah menyetujui Nicorette sebagai

obat merokok. Nicotrol dan Nicoderm juga sudah dalam tahap persiapan dilepas ke pasaran domestik dan global. Pada periode 1990-an, dengan David Kessler sebagai pucuk pimpinan FDA, FDA berani mengklaim bahwa merokok kemudian adalah pembunuh umat manusia nomor satu di dunia. World Health Organization (WHO) bahkan mempublikasikan sebuah laporan berjudul *Tobacco Dependence* yang menerangkan bahwa rokok merupakan wabah mematikan yang membunuh orang dewasa dan anak-anak (Hamilton 2001).

FDA dan beberapa MNC yang dijadikan *partner* kerjasamanya telah berhasil membawa wacana kejahatan merokok yang berangkat dari kerugian individu menjadi wabah mematikan global. Hal tersebut tidak lepas dari peranan industri farmasi dan asosiasi medis negara-negara maju produsen produk-produk terapi alternatif merokok. Dari sini bisa dilihat bahwa inovasi produk terapi pengganti tembakau hanyalah pemaksaan agenda dari industri farmasi dan pihak-pihak yang mendukung dan terlibat. Ironisnya, negara-negara maju produsen produk-produk terapi pengganti merokok ini tidak mengedarkan secara luas dan lancar produk yang telah mereka kembangkan. Padahal mereka sangat gencar untuk mempromosikan kegiatan anti-merokok mereka sampai dengan mengirim laporan ilmiah kepada WHO.

Konsekuensi lebih lanjut dari hal tersebut adalah negara-negara berkembang, atau negara dunia ketiga, tidak bisa berpenetrasi ke pangsa pasar nikotin negara maju. Hal ini cerminan dari feodalisme informasi yang dikatakan oleh Drahos dan Braithwaite. Negara maju tidak serta merta memberikan produk terapi alternatif rokok kepada negara-negara berkembang.

Globalisasi dan Perang Nikotin

Globalisasi yang terwujud melalui IPR memang cenderung untuk menjadikan sebuah aktor menjadi aktor feodal yang dapat memonopoli pasar (Markus 2000). Dalam kasus perang nikotin, bisa ditinjau bagaimana industri farmasi AS dan Inggris berusaha memonopoli pasar produk terapi alternatif pengganti rokok dengan memaksakan agenda mereka. Pemaksaan agenda mereka tercermin dari banyaknya kucuran dana yang mereka siapkan untuk mempromosikan produk-produk farmasi mereka.

Di AS, monopoli pasar dilakukan oleh FDA dan Pharmacia yang terus menerus mempromosikan produk farmasi terapi pengganti alternatif rokok. Indikasi dari hal ini bisa dilihat dari FDA yang memberi jangka waktu bagi Pharmacia untuk menyempurnakan produk Nicorette dan Nicotrol. Setelah produk Pharmacia sudah siap benar untuk diedarkan di pasaran, FDA baru kemudian menyetujui secara legal kegunaan Nicorette dan Nicotrol.

SmithKline Beecham adalah perusahaan multinasional farmasi yang memonopoli pasar produk terapi pengganti alternatif rokok di Inggris. Dengan produknya, Nicoderm, yang diproduksi secara massal maka SmithKline Beecham berhasil menjadi perusahaan multinasional Inggris pertama yang mengeluarkan produk terapi pengganti merokok. Untuk melancarkan usahanya, SmithKline Beecham kemudian mempersuasi asosiasi medis Inggris, BMA, untuk mendukung produknya tersebut dengan cara mengembangkan temuan-temuan ilmiah yang menyatakan bahwa merokok adalah berbahaya dan harus ditangani segera. Dalam beberapa edisi jurnal BMA, yakni BMJ, kemudian dimuat laporan-laporan ilmiah terkait dengan kerugian merokok beserta rentetan bahayanya. Tidak luput pula, dalam jurnal-jurnal ilmiah tersebut disematkan promosi produk SmithKline Beecham. Hal yang sama sebenarnya

juga dilakukan oleh Pharmacia dan FDA di AS. Semua pemaksaan agenda tersebut merupakan usaha perusahaan multinasional untuk memonopoli pasar produk terapi pengganti rokok di masing-masing negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan globalisasi yang mengubah pola relasi masyarakat sehingga membentuk masyarakat jaringan (Castells 1996), monopoli pasar bisa dilakukan dengan lebih fleksibel. Menurut Klein (2000) fleksibilitas dalam hal monopoli pasar salah satunya disebabkan oleh adanya masyarakat industri. Masyarakat industri bukanlah masyarakat yang terikat dalam *global consumerism* saja, namun juga masyarakat yang memiliki kesempatan untuk memproduksi komoditas-komoditas yang mereka produksi sendiri. Dalam masyarakat industri, Klein (2000) menyampaikan bahwa di era globalisasi, konsumen tidak memiliki pilihan perihal barang apa yang mereka konsumsi, bagaimana mereka konsumsi, dan sejauhmana mereka mengonsumsi komoditas yang mereka inginkan.

Fleksibilitas monopoli pasar dan ketidakdigdayaan masyarakat industri ditunjukkan lewat kasus perang nikotin. Jangan lupa bahwa FDA adalah biro kesehatan masyarakat negara AS yang juga mengatur regulasi peredaran makanan dan obat-obatan. Maka dari itu, FDA juga mempunyai kekuasaan untuk memutuskan komoditas mana yang bisa diperjualbelikan di masyarakat bebas dan komoditas mana yang tidak. Ketika FDA dan Pharmacia bekerjasama memaksakan agenda pelolosan Nicorette dan Nicotrol, tentu saja FDA pada saat itu memaksakan pilihan konsumsi kepada masyarakat AS. Masyarakat AS kemudian secara otomatis menjadi masyarakat industri yang pilihan komoditas terapi pengganti rokoknya terbatas oleh FDA. FDA disini telah melakukan pembatasan pilihan komoditas dengan hanya memaksakan produk dari Pharmacia.

Kasus perang nikotin yang terjadi di AS dan Inggris sebenarnya adalah hasil dari globalisasi neoliberal. Globalisasi neoliberal membuat pemerintah harus mengakui keterbatasannya dan melepaskan beberapa kewenangan kepada pihak swasta. Pergeseran ini menjadi beberapa ranah yang seharusnya menjadi ranah publik kemudian berubah menjadi ranah privat karena dikelola oleh swasta (LeGrain 2003). Bahaya IPR dan feodalisme informasi adalah perpindahan ranah tersebut. Produk terapi alternatif pengganti rokok yang berkembang di negara-negara maju seharusnya adalah ranah publik, namun yang terjadi justru privatisasi ranah publik. Privatisasi publik menjadikan *common property* menjadi *private property*. Akibatnya, ketika sebuah komoditas atau ranah diprivatisasi, maka orientasi utamanya adalah orientasi komersil. Inilah yang kemudian dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat, terutama di pihak konsumen.

Apa yang dilakukan oleh FDA sebagai cabang dari kewenangan pengelolaan publik sebenarnya sudah mencerminkan privatisasi ranah publik. FDA mempercayakan pengembangan komoditas produk terapi alternatif pengganti rokok kepada perusahaan multinasional swasta Pharmacia. Dampak dari adanya kebijakan ini adalah orientasi bisnis yang kemudian melekat pada komoditas produk terapi alternatif pengganti rokok yang dikembangkan oleh Pharmacia dan didukung oleh FDA. Ketika WHO mengeluarkan publikasi *Tobacco Dependence* itu bukan berarti pengingat agar permasalahan merokok menjadi konsiderasi utama pemerintah sehingga pemerintah mengambil alih. Publikasi WHO justru sebuah pertanda bahwa Nicotrol, Nicoderm, dan Nicorette adalah komoditas unggulan dan utama untuk mengatasi bahaya merokok. Tentu saja hal ini adalah usaha ranah privat untuk mendapatkan *profit* yang semakin besar.

Globalisasi, yang mana merujuk pada sebuah proses integrasi dan akselerasi, bisa jadi berdampak negatif. Sebenarnya untuk mengatasi dampak negatif tersebut, negara dapat berperan aktif. Oleh karenanya, positif atau negatifnya globalisasi dapat dikontrol melalui maksimalisasi peran negara (Singh 2005). Dengan maksimalisasi peran negara terhadap globalisasi, maka negara juga dapat memposisikan diri mereka apakah mereka termasuk pemenang (*winner*) atautkah menjadi pecundang (*loser*) dalam globalisasi (Chanda 2007).

Kesimpulan

Globalisasi, dalam salah satu sisinya, banyak menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah adanya komodifikasi ilmu pengetahuan. Komodifikasi pengetahuan yang dimaksud disini sama dengan apa yang diutarakan oleh Vandana Shiva tentang pergeseran nilai *common property* menjadi *private property* dan pergeseran *social goods* menjadi *capital returns*. Lebih lanjut, Drahos dan Braithwaite menamakan komodifikasi pengetahuan ini sebagai feodalisme informasi. Informasi yang merupakan inti dari pengetahuan sudah tidak bisa dimiliki oleh publik dan berganti menjadi milik privat. Akibat dari privatisasi pengetahuan adalah perubahan orientasi dari pemanfaatan informasi tersebut. Informasi kemudian digunakan bukan untuk kebaikan masyarakat bersama, namun lebih kepada keuntungan marjinal individu.

Kasus Eli Lilly dengan Madagaskar dan perang nikotin yang diprakarsai oleh FAD, Pharmacia, AMA, dan BMA merupakan dua contoh kasus yang menggambarkan adanya feodalisme informasi. Pengembangan tanaman *rosy periwinkle* oleh Eli Lilly yang kemudian diubah menjadi obat kanker Hodgins dan Pediatric Lymphocyte Leukemia hanya menguntungkan secara besar-besaran pihak Eli Lilly tanpa menimbulkan efek yang sama terhadap negara produsen utama *rosy periwinkle*, yakni Madagaskar. Hal yang relatif sama didapat dari kasus perang nikotin. Pengembangan obat terapi alternatif pengganti rokok yang ditangani oleh perusahaan multinasional swasta berakibat komoditas-komoditas yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan publik menjadi perhitungan keuntungan privat. Inovasi komoditas obat anti rokok (Nicotrol, Nicoderm, Nicorette) seharusnya menjadi konsumsi publik dengan aksesibilitas yang sangat mudah untuk dijangkau masyarakat jika merokok dikampanyekan sebagai kegiatan yang merugikan dan membahayakan. Namun, yang terjadi justru produk-produk tersebut hanya dipegang oleh industri farmasi dan kemudian berorientasi pada keuntungan materi industri tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Castells, Manuel. 1996. *The Rise of the Network Society*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Chanda, Nayan. 2007. *Bound Together: How Traders, Preachers, Adventurer, and Warriors Shaped Globalization*. New Haven: Yale University Press.
- Drahos, Peter dan J. Braithwaite. 2002. *Information Feudalism: Who Owns the Knowledge Economy?* New York: The New Press.
- Hamilton, Wanda. 2001. *Big Drug's Nicotine War*. FORCES International.

- Klein, Naomi. 2000. *No Space, No Choice, No Jobs, No Logo*. London: Flamingo.
- LeGrain, Philippe. 2003. *Open World: the Truth about Globalisation*, London: Abacus Book.
- Markus, Keith. E. 2000. *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Washington DC: Institute for International Economics.
- Scholte, Jan Aart. 2000. *Globalization: a Critical Introduction*. New York: Palgrave.
- Shiva, Vandana. 1993. *The Case against Free Trade*. Berkeley: North Atlantic Books.
- Singh, Kavaljit. 2005. *Questioning Globalization*. London: Zed Books.
- Verma, S.K.. 2000. "Biodiversity and Intellectual Property Rights", dalam *CASRIP Newsletter, Spring*.